

BAB II

PENYUSUNAN KERANGKA TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoretis

1. Pemahaman Materi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.² Menurut Bloom dalam Dimiyati dan Mudjiono, pemahaman merupakan salah satu yang termaksud dalam ranah kognitif. Bloom mengatakan bahwa pemahaman mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari.³

Dalam pemahaman menurut Arikunto, siswa diminta untuk membuktikan bahwa siswa memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.⁴ Sedangkan kata-kata operasional kognitif dari pemahaman ialah mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menggenerealisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, memperkirakan.⁵

Berdasarkan teori di atas dapat beranggapan bahwa pemahaman merupakan salah satu tingkat dalam ranah kognitif dengan tujuan untuk

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 998.

³ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 27.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hal. 118.

⁵ *Ibid*, hal. 137.

seorang siswa dapat menangkap arti, memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari. Mengenai pemahaman, Bloom mengemukakan taksonomi pemahaman berada pada ranah kognitif, yang terdiri atas :

- Mengenal, dalam mengenal siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih jawaban.
- Pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.
- Penerapan, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkan secara benar.
- Analisis, siswa diminta menganalisis suatu hubungan atau situasi kompleks atas konsep-konsep dasar.
- Sintesis, melakukan sintesis maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar mengembangkan struktur baru.
- Evaluasi, penyusunan soal sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal.⁶

Dari teori Bloom di atas dapat disimpulkan, bahwa pemahaman merupakan tingkat kedua setelah pengetahuan dari ranah kognitif sebagai proses dari tujuan siswa dalam belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, siswa merupakan seseorang yang sedang belajar dalam bangku sekolah, dalam belajar juga pasti dibutuhkan kemampuan untuk memahami pelajaran sebagai ranah kognitif. Dengan demikian bahwa pemahaman berarti seseorang tahu apa yang harus dilakukan terhadap apa yang diketahui yakni di antaranya dapat untuk menjelaskan, membedakan, memberi contoh, dan menyimpulkan.

⁶ *Ibid*, hal. 117-120.

Pengertian ilmu politik sangat luas jangkauannya. Para ahli ilmu politik lebih merincikan dan menggabungkan kembali mengenai teori dalam pendekatan tingkah laku (*approach*), mengenai sikap dan perilaku manusia yang bisa dilihat dari pemahamannya mengenai politik. Hal ini tertuang dalam pendapat Robert Dahl dkk dalam Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa:

Ilmu politik menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara lebih sistematis, berdasarkan pengalaman empiris dan dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat. Pendekatan ini terkenal dengan nama “pendekatan tingkah laku” (*behavioral approach*).⁷ Pendekatan tingkah laku mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat di dalamnya.⁸

Terdapat konsep-konsep pokok yang menampilkan suatu tujuan dari para kaum *behavioralis*. Konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
2. Generalisasi-generalisasi ini pada azasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan.
3. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian.
4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantitatif.
5. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori dan ilmu sosial lainnya.⁹

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 4-5.

⁸ *Ibid* , hal. 7.

⁹ *Ibid*. hal. 5

Menurut Almond dalam Komarudin Sahid, proses politik membentuk nilai-nilai yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam politik. Hal ini menunjuk pada proses pembentukan sikap dan pola tingkah laku sosial.¹⁰

Jadi definisi dari teori di atas, bahwa ilmu politik dapat diukur dengan melihat pola-pola tingkah laku atau perilaku manusia dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam data kuantitatif. Sehingga dapat diasumsikan, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan nantinya akan berlanjut ketingkat pemahaman yang akan dihubungkan oleh perilaku.

Anggapan bahwa perilaku menunjukkan tingkah laku terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu Perilaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan individu untuk mengatasi sesuatu.

Pendapat lain tertuang pada sudjiono sastroatmodjo, yaitu bahwa dalam politik, perilaku dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku sosial masyarakat atau warga Negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu sistem politik.¹¹

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mohtar Mas'Oed dan Colin MacAndrews. Tingkah laku menunjukkan perilaku yang berupa tindakan untuk saling mendukung. Tingkah laku itu mungkin berujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain. Mungkin berujud memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang pemimpin dalam pemilihan umum, atau membela atau mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh

¹⁰ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 198.

¹¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995). Hal. 1.

badan yang berwenang. Dalam kasus-kasus ini tingkah laku tersebut menyatakan diri dalam bentuk tindakan nyata dan terbuka.¹²

Pada dasarnya politik adalah suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan tentang kehidupan bermasyarakat dan negara. Dalam konteksnya, politik menyangkut hal sebagai gejala sosial yang berhubungan dengan aspek pemerintahan dan rakyat, yang semuanya berkaitan antara satu sama lain. Jadi apabila berbicara politik, berarti berbicara menyangkut urusan negara baik itu bentuk pemerintahannya maupun sistem pemerintahan yang dijalaninya.

Pemikiran tentang definisi politik banyak berkembang dari abad ke abad. Pemikiran tentang definisi politik terus bergulir hingga masa sekarang. Plato dan Aristoteles, politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.¹³ Sedangkan menurut Peter Merkl, menggambarkan politik sebagai usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan keadilan.¹⁴

Rush dan Althoff, politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia; atau proses dengan mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif (dalam kekuasaan yang sah)

¹² Colin MacAndrews dan Mochtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1995), hal. 11-12.

¹³ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 55.

¹⁴ *Ibid.*

mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Colin MacAndrews, ruang lingkup politik berkaitan dengan masalah cara pembuatan keputusan-keputusan yang otoritatif dalam suatu masyarakat, maka tuntutan-tuntutan itu memerlukan perhatian khusus sebagai input utama bagi sistem politik.¹⁶ Charles Hyneman berpendapat, lingkup politik sekarang semakin luas meliputi “ struktur organisasional, proses pembuatan, keputusan dan tindakan, politik penguasaan, kebijaksanaan dan tindakan serta lingkungan manusia dari suatu pemerintahan yang legal.¹⁷

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹⁸

Pada dasarnya politik yang berupa sistem terbentuk dalam suatu masyarakat. Masyarakat inilah yang terjun atau melibatkan diri dalam kegiatan politik atau partisipasi politik, yang disebabkan karena adanya suatu tuntutan-tuntutan dari orang-orang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak semuanya dapat terpenuhi dan memuaskan di dalam kebijakan pemimpin. Dari peran serta masyarakat yang aktif dalam kegiatan partisipasi politik, hal ini membawa pengaruh dan dampak kebiasaan yang positif dalam masyarakat. Semua ini akan membentuk suatu kebiasaan yang membudaya dalam keseharian yang berupa Sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku inilah yang membentuk budaya politik bagi masyarakat.

¹⁵ Komarudin sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 5.

¹⁶ Colin MacAndrews dan Mochtar Mas'oeed, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1995), hal. 10.

¹⁷ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 9.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 8.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.¹⁹ Berdasarkan definisi ini, maka tipe-tipe budaya politik suatu masyarakat dapat terlihat. Dengan kata lain pengertian budaya politik dapat digunakan untuk mengukur dan menilai budaya politik suatu masyarakat atau bangsa menurut tipe-tipe budaya politik tertentu. Adapun tipe-tipe budaya politik bagi bangsa Indonesia yaitu : Budaya Politik Parokial, Budaya Politik Subyek/Kawula, Budaya Politik Partisipan.²⁰ Dalam Penelitian ini peneliti mencantumkan konsep budaya politik partisipan, yang dilihat dalam konsep budaya demokrasi.

Menurut Almond dan Verba dikutip Komarudin Sahid, tipe budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap sistem secara keseluruhan, struktur dan proses politik administrative objek-objek *input* dan *output*. Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya politik partisipan menurut studi Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat.²¹

Budaya politik dalam suatu bangsa dapat dilihat dan diukur melalui tipe-tipe budaya politik yang ada di suatu bangsa tersebut. tipe-tipe tersebut tentunya berdasarkan penilaian survei suatu penelitian. Dan tipe-tipe budaya

¹⁹ Nazarudin Sjamsudin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 21.

²⁰ Komarudin sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 155.

²¹ *Ibid*, hal. 157.

politik bagi bangsa Indonesia adalah parokial, subyek / kawula, dan partisipan.

Jadi menurut pendapat para ahli di atas, definisi dari politik adalah usaha serta cara dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, baik itu dalam pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dalam arti lain dapat disimpulkan, politik ialah kegiatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang sifatnya mengikat untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara. Dengan demikian di dalam politik manusia akan hidup secara bahagia dan berkeadilan tinggi dalam tatanan moralitas nilai yang tinggi di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan dalam definisi politik melahirkan beberapa konsep pokok mengenai unsur politik, konsep-konsep itu merupakan hasil kesamaan dari definisi politik.

Menurut Miriam Budiardjo, konsep-konsep pokok politik itu adalah Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policys beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).²²

Juga menurut The Liang Gie, konsep-konsep politik dibedakan menjadi :

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 9.

1. Negara
2. Pemerintahan
3. Kekuasaan
4. Fakta politik
5. Organisasi masyarakat
6. Kegiatan politik.²³

Jadi konsep politik mempelajari hal yang menyangkut tentang negara atau pemerintahan, kekuasaan, organisasi masyarakat, serta kegiatan-kegiatan. Mengenai organisasi politik, organisasi merupakan sistem kerjasama sekelompok manusia dalam kegiatan tertentu. Jadi dalam organisasi tentu terdapat kegiatan-kegiatan manusia di dalamnya.

Yang dimaksud dengan kegiatan politik ialah segenap usaha orang untuk memerintah dirinya sendiri, menciptakan pemerintah-pemerintah dan negara-negara dan untuk mengendalikan nasibnya dalam hidup bermasyarakat. Yang memakai istilah “*political behavior*”.²⁴

Maka dari itu, dimulai dari kegiatan-kegiatan politik inilah timbul tingkah laku yang berupa perilaku politik dalam diri seseorang. Perilaku-perilaku inilah yang dinilai sebagai tujuan dari kesadaran akan politik, yang berguna demi kesejahteraan orang banyak.

Untuk melaksanakan semua itu, pemerintah maupun masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran politik. Kesadaran politik juga harus dicerminkan kepada diri siswa. Untuk menumbuhkan kesadaran akan politik

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1982), hal. 16.

²⁴ *Ibid*, hal. 23-24.

sebagai warga negara, maka harus memiliki partisipasi politik dan pendidikan politik yang tinggi, sebagaimana keduanya mempunyai peran dan fungsi yang amat penting.

Gaventa dan Valderama menyatakan bahwa, partisipasi politik melibatkan intreraksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Karena itu, partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung.²⁵

Menurut Alfian, makna pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.²⁶

Peran partisipasi politik dan pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arahan sebagai makna suatu nilai-nilai yang sedang berlangsung bagi suatu negara. Nilai-nilai yang terkandung ini tentunya harus sesuai dengan norma-norma dasar negara Indonesia yaitu, Ideologi nasional atau Pancasila. Karena sebagai peningkatan kesadaran rakyat atau warga negara, mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara bertanggung jawab penuh. Selain itu untuk para siswa, partisipasi politik dan pendidikan politik berguna untuk pemahaman dan minat politik siswa sebagai warga negara Indonesia.

²⁵ Komarudin Sahid, *op. cit*, hal. 176-177.

²⁶ Sri Wuryan, *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*, (Bandung : Laboratorium Pendidikan KWN Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI , 2008) hal. 71.

Dilain hal, pendidikan politik bertujuan menjadikan semua warga negara tunduk dan patuh terhadap hukum yang dilandasi dengan penuh kesadaran. Memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi, aktif dan kreatif sebagai warga negara, serta menjunjung tinggi kehidupan yang demokratis secara sadar.

Begitupun halnya pendidikan politik untuk siswa. Tujuan dari pendidikan politik bagi siswa adalah agar siswa mengetahui dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara tentunya dilandasi dengan penuh tanggung jawab.

Politik mempunyai arti sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam lingkup politik yang mempengaruhi segi input (sistem) dan output (proses politik) yang dinamakan dengan sistem politik. sistem politik diikuti sertai oleh segenap warga negara atau masyarakat di dalam lingkup politik dengan tujuan mempunyai suatu kepentingan secara bersama-sama. Contohnya dalam segi input yaitu berupa tuntutan dan dukungan contohnya dalam segi ekonomi, status masyarakat, kekuasaan dan pendidikan. Sedangkan dari segi output yaitu berupa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin, dalam melaksanakan dan penegakkan tuntutan dan dukungan tersebut.

Dalam garis besar, politik mempunyai peran dalam kegiatan-kegiatan antar individu satu atau kelompok satu untuk mempengaruhi individu lain

atau kelompok lain guna mencapai suatu kepentingan tujuan secara bersama-sama.

Hal ini juga berpengaruh pada lingkungan siswa di sekolah. Dengan adanya peran lembaga Organisasi siswa di sekolah, yaitu sebagai wadah bagi para siswa dalam memulai pendidikan politik mereka. Siswa diajarkan dan untuk terjun langsung serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik di sekolah.

Untuk terlaksananya politik dengan baik maka di sekolah dibuat kurikulum tentang materi politik untuk siswa, yang terdiri dari kajian-kajian politik yang berupa budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi pengembangan politik, serta peran serta budaya politik partisipan. Untuk mewujudkan semua itu harus dibarengi dengan dukungan yang berupa aspek pemahaman yang bermula dari pengetahuan serta diiringi perilaku. Pemahaman akan ilmu politik amatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat juga bagi kelangsungan siswa di sekolah. karena pemahaman politik berhubungan dengan perilaku manusia. Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan mengenai budaya demokrasi yang dibatasi pada perilaku. Di mana demokrasi merupakan suatu bentuk sistem politik yang berperan dalam tindakan dan tingkah laku individu dalam partisipasi politik, yang berkembang dan diterapkan dalam kehidupan

masyarakat. Budaya merupakan hasil dari perilaku manusia, yang masuk dalam budaya demokrasi.

Untuk indikator pemahaman materi politik, peneliti mengambil teori Bloom dikutip suharsimi Arikunto, berdasarkan kata operasional kognitif dari pemahaman yaitu menjelaskan, membedakan, memberikan contoh, dan menyimpulkan.

2. Budaya Demokrasi

Pada saat ini banyak negara yang mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal ini menunjuk bahwa rakyat berada dalam posisi atau peran penting dalam suatu negara. Tak beda dengan negara Indonesia yang bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Negara demokrasi memerlukan budaya demokrasi untuk dapat mewujudkan negara demokrasi tersebut. Yang mana baik pemerintahan dan warga negaranya harus memiliki sikap dan perilaku demokrasi.

Dalam upaya menerapkan budaya demokrasi, peran sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi siswa untuk belajar berdemokrasi. Yang mana semua warga sekolah dan semua unsur yang ada di sekolah bertanggung jawab dan mendukung langgengnya demokrasi di Indonesia. Untuk lebih memahami budaya demokrasi, terlebih dahulu kita mengenal tentang budaya dan demokrasi itu sendiri.

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, *buddhayah*, sebagai bentuk jamak dari *budhi*, yang artinya budi atau akal. Dalam bahasa Inggris budaya sama dengan *culture*. *Culture* berasal dari bahasa Latin, *colere*, yang artinya segala daya dan upaya manusia untuk mengubah alam.²⁷

Ilmu Antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.²⁸

Koentjaraningrat mengemukakan, budaya adalah segala sesuatu yang dibuat manusia yang berupa hasil cipta dan karya manusia yang mengalami perubahan dan menerima peninggalan budaya dari generasi sebelumnya.²⁹

Kemudian menurut pendapat ahli lain Edward Burnett Tylor, secara luas mengartikan budaya sebagai : “*Culture or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*”. Atau budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat.³⁰

Menurut Michel Thompson pengertian budaya ialah, sebagai cara hidup dirumuskan sebagai interaksi yang saling meneguhkan antara *cultural*

²⁷ Pengertian Budaya, <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hal. 180.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Edward Burnett Tylor dikutip Muhammad, *Budaya Organisasi*.
<http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1065>. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

bias (nilai dan norma yang dipahami bersama) dan *social practice* (hubungan sosial).³¹

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, bahwa budaya merupakan kumpulan dari keyakinan, nilai-nilai, kepercayaan dan kebiasaan sehingga membentuk norma perilaku bagi individu yang berada dalam kumpulan masyarakat atau organisasi. Kebudayaan dapat tampak dalam bentuk perilaku masyarakat yang berupa hasil dari gagasan, ide-ide, serta pemikiran yang diimplikasikan dalam sikap dan perilaku seseorang sehari-hari. Serta budaya ialah segala aktivitas atau seluruh tindakan manusia dan karya manusia.

Di dalam budaya terdapat unsur-unsur kebudayaan, sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia .

Menurut koentjraningrat, terdapat unsur-unsur yang secara universal, ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan. Ke tujuh unsur pokok itu adalah:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem pencaharian hidup

³¹ Miriam Budiardjo, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 33.

6. Sistem religi
7. Kesenian.³²

Semua unsur kebudayaan diatas, dapat dipandang dari ketiga wujud kebudayaan. Melihat kebudayaan dilihat dari unsur-unsur yang mana. Tiga wujud kebudayaan antara lain :

1. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang dikatakan sebagai sistem budaya.
2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang dikatakan sebagai sistem sosial.
3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang disebut dengan kebudayaan fisik.³³

Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat dan akan selalu berkembang dalam upaya memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Dalam budaya demokrasi ditandai dengan adanya musyawarah dalam memutuskan hasil dan saling berbagi nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota di dalamnya. Misalnya berbagi nilai dan keyakinan yang sama melalui proses tujuan atau kegiatan. Contoh perilaku budaya demokrasi siswa tercermin dalam anggota organisasi OSIS, yang mengedepankan musyawarah dalam kegiatan pengurusan OSIS. Para anggota OSIS harus membawa rasa bangga dan membentuk citra organisasi yang kuat.

Setelah mengetahui konsep dasar dari budaya, sekarang penulis akan membahas mengenai arti demokrasi.

³² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hal. 203-204.

³³ *Ibid*, hal. 186-187.

Abraham Lincoln berpendapat, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*)³⁴

Menurut C. F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.³⁵

Pengertian demokrasi dari beberapa ahli di atas ialah, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di mana rakyat juga mempunyai kekuasaan, atau dapat di katakana pula rakyat juga mempunyai kedaulatan penuh dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah. rakyat mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan suaranya dalam kegiatan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Pemerintah telah mendapat mandat atau perintah dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, dan pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya itu berlandaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dengan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

³⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hal. 92.

³⁵ *Ibid.*

Arti demokrasi berbeda, tercetus oleh pendapat para ahli lain di bidang politik, para ahli politik membangun sebuah teori baru tentang demokrasi yang dapat diselaraskan kembali dengan teori elit politik. Mereka membangun suatu pendapat tentang demokrasi sebagai suatu sistem politik, diantaranya yaitu :

International Commission for Jurist. Demokrasi sebagai sistem politik, yaitu sistem politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.³⁶

Selanjutnya Henry B. Mayo berpendapat. Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³⁷

Sartori, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana pengaruh kelompok mayoritas dijamin oleh kelompok minoritas yang dipilih dan berkompetisi dan yang kepadanya sistem itu dipercayakan.³⁸

Jadi demokrasi juga diartikan sebagai sistem politik, yang berperan untuk melindungi kebebasan warga negara sekaligus memberi mandat bagi pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut, dan bagaimana sebenarnya tindakan serta perilaku masyarakat. Pada dasarnya demokrasi itu merupakan

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2007), hal. 61.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 215.

kelembagaan dan kebebasan. Dan inilah yang disebut dengan sistem politik demokrasi, yang memegang teguh hak kebijaksanaan umum mayoritas.

Hal ini tertuang pada pendapat Maswadi Rauf, bahwa prinsip utama demokrasi ada dua :

1. Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*)
2. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)³⁹

Robert Dahl juga berpendapat, demokrasi juga melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan (*contestation*) dan peran serta (*participation*). Prosedur demokrasi seperti ini mengasumsikan adanya kebebasan-kebebasan berbicara, menyebarluaskan pendapat, berkumpul, dan berserikat sehingga perdebatan politik dan kampanye pemilihan umum dapat diselenggarakan.⁴⁰

Gaffar mengatakan, makna demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan berperilaku. Nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif dan rasional, kasih sayang dan peduli, respek terhadap sesama, dan menerima perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat.⁴¹

Demokrasi mengandung makna, sebagai bentuk dari pemerintahan yang memegang teguh hak rakyat dalam kebebasan. Tetapi konteks kebebasan disini harus tertuang dalam nilai-nilai bangsa yang luhur, dilandasi dari ideologi bangsa pancasila. Nilai-nilai ini didasari oleh keinginan dan

³⁹ Winarno, *op.cit*, hal 93.

⁴⁰ Miriam Budiarto, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta : raja Grafindo, 1996), hal. 10.

⁴¹ Sri Wuryan dan Syaifullah, *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*, (Bandung : Laboratorium Pendidikan KWN UPI Bandung, 2008), hal. 85.

kebutuhan yang sama antara individu satu dan lainnya. Dapat ditegaskan bahwa demokrasi menekankan adanya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan yang dilandasi oleh norma atau aturan yang berlaku. Yang nantinya dalam nilai-nilai demokrasi akan terwujud dan timbul suatu kebiasaan sikap dan pola perilaku yang disebut dengan budaya demokrasi.

Menurut John Dewey, demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dari perlunya partisipasi dari warga Negara dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama.⁴² Sedangkan menurut Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah.⁴³ Menurut Bingham Powell, Jr, budaya demokrasi adalah bagaimana nilai-nilai ideal demokrasi dijalankan.⁴⁴

Jadi menurut pendapat para ahli di atas ialah, bahwa kultur atau budaya demokrasi berlaku pada nilai-nilai demokrasi dimasyarakat. Dan nilai-nilai tersebut diperaktekkan dalam perilaku sehari-hari dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Atau dalam kata lain budaya merupakan hasil dari perilaku demokrasi yang masuk dalam budaya demokrasi. Juga budaya demokrasi

⁴² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hal. 99

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nazaruddin Sjamsudin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 152.

merupakan pemahaman praktek pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik sehari-hari.

Budaya demokrasi adalah sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, menghormati perbedaan pendapat dan memahaminya, serta mengajak segenap lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup secara damai.

Untuk dapat melaksanakan budaya demokrasi tersebut, masyarakat Indonesia harus dapat membudidayakan perilaku-perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Dan membentuk masyarakat yang demokratis. Karena budaya demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara, dan didasari oleh beberapa nilai-nilai demokrasi di suatu Negara.

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi harus didasari oleh beberapa nilai, yang dianut oleh masyarakat demokratis. Nilai-nilai tersebut yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan.⁴⁵

Rusli Karim menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis meliputi : inisiatif, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab dan kerjasama keterhubungan.⁴⁶

Nilai-nilai demokrasi harus dipraktekkan dan dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi nantinya akan berubah menjadi perilaku hidup. Nantinya dari nilai-nilai dan perilaku hidup ini, akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan. Inilah apa yang disebut dengan budaya demokrasi.

Tetapi dalam pelaksanaan budaya demokrasi tidak hanya berlandaskan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut dibutuhkan atau perlu diselenggarakan lembaga-lembaga demokrasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiarjo, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

1. pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. suatu dewan perwakilan rakyat yang memiliki golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilih umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan ini

⁴⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2007), hal. 62.

⁴⁶ Winarno, *op,cit.*

mengadakan pengawasan memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinu.

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁴⁷

Lembaga-lembaga demokrasi ini berguna untuk menampung atau sebagai wadah aspirasi rakyat, serta adanya lembaga demokrasi diharapkan dapat terlaksananya sistem politik demokrasi bagi masyarakat.

Contoh di dalam sekolah, di bentuklah lembaga-lembaga organisasi siswa yaitu OSIS dan MPK. Lembaga-lembaga ini berperan penuh dalam pembentukan atau sebagai wadah proses pembelajaran siswa dalam hal berpolitik dan berdemokrasi. Lembaga-lembaga ini mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaannya.

Alan Brown menyatakan, Masyarakat adil akan lebih dapat dicapai apabila sebanyak mungkin warga negara terlibat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*participatory democracy*).⁴⁸

Jadi budaya demokrasi akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, apabila masyarakat warga negaranya juga ikut berpartisipasi dalam hal demokrasi yang terkait pada pelaksanaan sistem politik.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Garamedia Pustaka Utama, 2007), hal. 63-64.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Teori-teori Politik dewasa Ini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 1996), hal. 13.

Demikian juga dengan siswa, untuk tetap budaya demokrasi tercipta, terwujud, dan tidak pudar di Negara Indonesia. Siswa harus terus berpartisipasi aktif dalam hal pembangunan demokrasi.

Dari uraian di atas, bahwa telah diketahui demokrasi bukan hanya sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi telah berkembang sebagai suatu pandangan atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup demokratis atau biasa yang sering disebut dengan budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pelaksanaan sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga negara dalam konsep demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam perwujudan budaya demokrasi, budaya demokrasi harus mencakup nilai-nilai demokrasi yang sudah ada dan diterapkan secara universal dan dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang terlaksananya nilai-nilai demokrasi, sehingga timbul kultur atau budaya demokrasi tersebut bagi masyarakat. kemudian dilihat dari nilai-nilai demokrasi inilah timbul suatu perwujudan perilaku demokrasi yang akan membudaya.

Begitu juga budaya demokrasi yang harus dan dipraktekkan bagi siswa di sekolah. Dalam upaya menegakkan budaya demokrasi, lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi siswa untuk belajar berdemokrasi. Di sekolah, para siswa dilatih untuk giat belajar, mengemukakan pendapat, toleransi, menaati tata tertib, berpartisipasi langsung

dalam kegiatan sekolah. Di sekolah mempunyai banyak media berlatih dan belajar demokrasi dan menerapkan budaya demokrasi seperti adanya organisasi siswa baik intra dan ekstra, diskusi-diskusi dan dialog siswa, adanya rapat-rapat organisasi siswa tersebut, dll. Yang semua ini harus dapat dibudayakan dengan membiasakan diri berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa disekolah maupun di lingkungan masyarakat, tentunya dalam bentuk tanggung jawab penuh.

Pemahaman akan politik amat berperan bagi siswa di sekolah. Karena pemahaman tentang materi politik berhubungan dengan perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari siswa di sekolah. Diharapkan dalam politik dapat membentuk nilai-nilai demokrasi yang dipraktekkan dalam perilaku siswa yang kemudian dapat diteruskan menuju budaya demokrasi.

Adapun indikator dari budaya demokrasi, dikutip oleh Gaffar dan Rusli Karim dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan dalam perilaku demokrasi yaitu ; toleransi, tanggung jawab, keterbukaan, inisiatif, kerjasama.

B. Kerangka Berpikir

Setiap sekolah tentunya menginginkan keberhasilan dalam menciptakan lulusan-lulusan siswa yang bermutu yang secara tak langsung, sekolah turut meningkatkan kualitas pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan sekolah untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah dengan meningkatkan

pendidikan dalam bidang pengetahuan. Dalam pembelajaran Kewarganegaraan, siswa diajarkan pendidikan politik dengan diadakannya materi mengenai politik. Dengan adanya pembelajaran mengenai materi politik diharapkan siswa dapat mewujudkan budaya demokrasi yang diterapkan melalui perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi penerus bangsa.

Anggapan dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMAN 5 DEPOK. Maka penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa pemahaman materi politik berarti seseorang tahu apa yang harus dilakukan terhadap apa yang diketahui yakni di antaranya dapat untuk menjelaskan, membedakan, memberi contoh, dan menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam politik meliputi arti dan makna politik, budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi pengembangan budaya politik, dan peran serta budaya politik partisipan.

Sedangkan budaya demokrasi siswa yaitu diharapkan siswa dapat menghargai toleransi, tanggung jawab, keterbukaan, kerjasama serta mampu mengemukakan pendapat secara jelas dan sistematis.

Jadi semakin tinggi pemahaman siswa tentang materi politik maka semakin tinggi pula budaya demokrasi siswa, sebaliknya semakin rendah pemahaman siswa tentang materi politik maka semakin rendah pula budaya demokrasi siswa.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoretis dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan rumusan hipotesis sebagai berikut : bahwa “ terdapat hubungan positif antara pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMAN 5 DEPOK” Artinya, semakin tinggi pemahaman siswa tentang materi politik maka semakin tinggi pula budaya demokrasi siswa.